BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umumbagi pengguna eksternal.

   Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Kriteria ETAP di atas bias dibedakan dengan entitas yang memiliki akuntabilitas publik entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifkan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik

adalah UMKM, oleh karena itu pengguna ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UMKM (SAK ETAP 2009;1).

SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan lebih cepat diperkenankan. Jika hal itu dilakukan perusahaan, makan entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010 (SAK ETAP 2009:166).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yaitu sebuah standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu sebuah entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit (IAI;2012;1).

2.1.1.1 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2009), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi:

1) Neraca; Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan;

properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas.

2) Laporan laba rugi; Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan; beban keuangan; bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; beban pajak; laba atau rugi neto.
3) Laporan perubahan ekuitas;

Dalam laporan ini menunjukkan:

a) Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.
b) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.

4) Laporan arus kas; Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan

yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
6) Pengakuan dalam laporan keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2009):

1) Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan.

   Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

   a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.
   b) Dimiliki untuk diperdagangkan.
   c) Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

d) Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

2) Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

3) Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

4) Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Laba atau rugi merupakan selisih antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

2.1.1.2 Indikator

Tujuan dari SAK ETAP adalah untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah. SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha skala kecil dan

menengah di Indonesia. Beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks, Karakteristik dari SAK ETAP antaralain:

1) *Stand alone accounting standard* (tidak mengacu keSAK Umum)
2) Mayoritas menggunakan *historical cost concepts*
3) Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan Usaha Kecil dan Menengah
4) Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK Umum
    a) Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang paling sederhana
    b) Penyerdehanaan pengakuan dan pengukuran
    c) Pengurangan pengungkapan

(IAI:2012)

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM

Kualitas pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dalam laba perusahaan. Pandangan ini menyatakan laba yang berkualitas tinggi terrefleksi pada laba yang dapat berkesinambungan (sustainable) untuk suatu perioda yang lama (Schipper,2004;81)

Kualitas pelaporan keuangan berkaitan erat dengan kinerja perusahaan yang diwujudkan dalam laba perusahaan yang diperoleh pada tahun berjalan. Pelaporan keuangan dikatakan tinggi (berkualitas) jika laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan dimasa yang akan datang atau berasosiasi secara kuat dengan arus kas operasi di masa yang akan Implikasi dari pandangan tersebut, menunjukkan bahwa fokus pengukuran kualitas pelaporan

keuangan perusahaan tersebut berkaitan dengan sifat-sifat pelaporan keuangan(Richardson,2003;49)

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut(Irham Fahmi,2011;2). Laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya (IAI, 2002 : par 47).

Laporan Keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan (Mamduh M. Hanafi **,**2002:63).

UMKM adalah tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industry kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembagalembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembebanan usahanya darimodal sendiri atau sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum memiliki status badan hukum (Pramiyanti,2008:5).

UU No. 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah, terdapat beberapa definisi yang dapat mengklasifikasikan suatu entitas ke dalam jenis usaha kecil atau menengah yaitu:

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usahamenengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaanatau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Selain itu,UMKM juga memiliki beberapa kriteria yaitu:

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

	Asset	Omzet
Usaha Mikro	Maximal 50.000.000	Maximal 300.000.000
Usaha Kecil	>50.000.000 – 500.000.000	>300.000.000 – 2.500.000.000
Usaha Menengah	>500.000.000 – 10.000.000.000	2.500.000.000 – 50.000.000.000

Sumber:UU No. 20 tahun 2008 BAB IV Pasal 6

Menurut Pramiyanti (2008:5) menjelaskan bahwa :

> "UMKM yang pertama adalah tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industry kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembagalembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembebanan usahanya darimodal sendiri atau sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum memiliki status badan hukum".

2.1.2.1 Hambatan UMKM

Secara umum UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah yang termasuk dalam masalah finansial di antaranya adalah (Urata, 2000, dalam Pramiyanti, 2008:4):

1) Banyak UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.
2) Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM.
3) Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil.
4) Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
5) Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.

Sedangkan yang termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non-finansial) diantaranya adalah :

1) Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkanoleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
2) Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
3) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.
4) Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

2.1.2.2 Indikator

Berdasarkan PSAK No 1 (2007;7) Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan

maksud penggunaannya. Informasi dapat dikatakan relevan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) *Feedback value* (manfaat umpan balik), Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
b) *Predictive value* (memiliki manfaat prediktif), Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c) Tepat waktu, Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d) Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Agar informasi yang disajikan dapat relevan maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan pemerintah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat

menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan.Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur, Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
c) Netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.Agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya (andal) maka penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disajikan secara menyeluruh.

3) Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahannya secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Agar informasi yang disajikan dapat dibandingkan maka penyajian laporan keuangan pemerintah minimal harus disajikan dalam 2 (dua) periode atau 2 (dua) tahun anggaran.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Hal ini dapat terlihat dari manfaat informasi yang disajikan tersebut terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggunakan format/bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna harus diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam kenyataannya, pemerintah masih menghadapi beberapa kendala kendala dalam menyajikan informasi yang relevan dan andal tersebut. Kendala tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang relevan dan andal

akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam penyajian laporan keuangan pemerintah tersebut, yaitu:

1) Materialitas

   Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalammencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.Selama seluruh informasi yang material telah disajikan dalam laporan keuangan maka laporan keuangan pemerintah tersebut dapat dikatakan wajar. Hal inilah yang mengakibatkan mungkin saja ada suatu informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

2) Pertimbangan Biaya dan Manfaat

   Manfaat yang dihasilkan informasi akuntansi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Dampak dari pertimbangan biaya dan manfaat tersebut, laporan keuangan pemerintah diperbolehkan untuk tidak menyajikan segala informasi, apalagi jika informasi tersebut manfaatnya lebih kecil daripada biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi atas biaya dan manfaat membutuhkan proses pertimbangan yang matang. Biaya penyajian informasi tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat, karena manfaat dari penyajian informasi tersebut mungkin saja dinikmati oleh pengguna lain di luar mereka yang menjadi tujuan informasi.

3) Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif yang diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapka dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Bisa saja untuk mementingkan dipenuhinya keandalan suatu informasi, menyebabkan informasi tersebut kurang relevan, begitupula sebaliknya jika relevansinya dipentingkan, mengakibatkan informasi tersebut kurang andal. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus mungkin akan berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan, adakalanya pengguna lebih membutuhkan informasi yang andal dibandingkan informasi yang relevan, namun bisa saja pengguna lebih mementingkan kerelavansian dari pada keandalannya.Untuk itu, dibutuhkan suatu pertimbangan profesional dalam penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut agar dapat menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.1.3 Peraturan pemerintah No 46 tahun 2013

PP No. 46 Tahun 2013 adalah wajib pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimasukkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang (Siti Resmi;2014).

Bukan Subjek PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 WP orang pribadi (WPO) yang tidak dikenakan PPh Final sesuai dengan PP ini

adalahmereka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yangmenetap maupun tidak menetap, dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidakdiperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Sedangkan Wajib Pajak Badan yang tidak dikenakan PPh Final sesuai denganketentuan PP ini adalah:

1) Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial, atau
2) Wajib Pajak Badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasisecara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.8 miliar
3) Wajib Pajak yang masuk kriteria ini tidak dikenakan PPh Final sesuai ketentuandalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, melainkan dikenakan PPh sesuai denganUndang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana biasanya.

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun2013 Tarif PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ditetapkan sebesar1% (satu persen), dan DPP untuk menghitung PPh Final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2013, yaitu:

1) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

   Ayat (1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

2) Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Ayat (1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PajakPenghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.Dengan demikian, PPh Final yang terutang yang harus dibayar setiap bulan olehWajib Pajak yang bersangkutan = 1% x peredaran bruto bulan tersebut.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter

2.1.3.2 Indikator

Pengenaan PPh Final 1% bagi pengusaha UMKM ini tidak sesuai dengan konsepkeadilan *(equality principle*)dan tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Pengenaan pajak yang adil ialah apabila semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Penghasilan yang dimaksudoleh Ruston Tambunan adalah penghasilan neto, yang sebelumnya telah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakanyang berlaku. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep pemotongan pajak dalam PPhFinal 1%

bagi UMKM yang dasar pengenaan pajak nya lanngsung dihitung dari peredaran bruto pelaku usaha tanpa dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan(Ruston Tambunan;2013)

2.2 Kerangka Pikir

2.2.1 Penerapan SAK ETAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM

Dalam pembuatan laporan keuangan kendala-kendalanya antara lain kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya waktu yang difokuskan untuk membuat laporan keuangan karena waktu yang ada lebih dimaksimalkan pada kegiatan operasi usaha dan semua transaksi dilakukan menggunakan Kas ditangan (Delviana Sagala,2014).

SAK ETAP akan membantu UKM dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal dengan tanpa terjebak dalam kerumitan standar berbasis IFRS yang akan diadopsi dalam Standar Akuntansi PSAK. (M. Jusuf Wibisana, Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), /2013)

Laporan keuangan menjadi salah satu komponen yang mutlak harus dimiliki oleh UKM jika mereka ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan modal kepada para kreditur yang dalam hal ini adalah pihak perbankan.(Setiawan, 2007).

2.2.2 Penerapan Kualitas Laporan Keuangan UMKM dan Pengaruhnya Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.

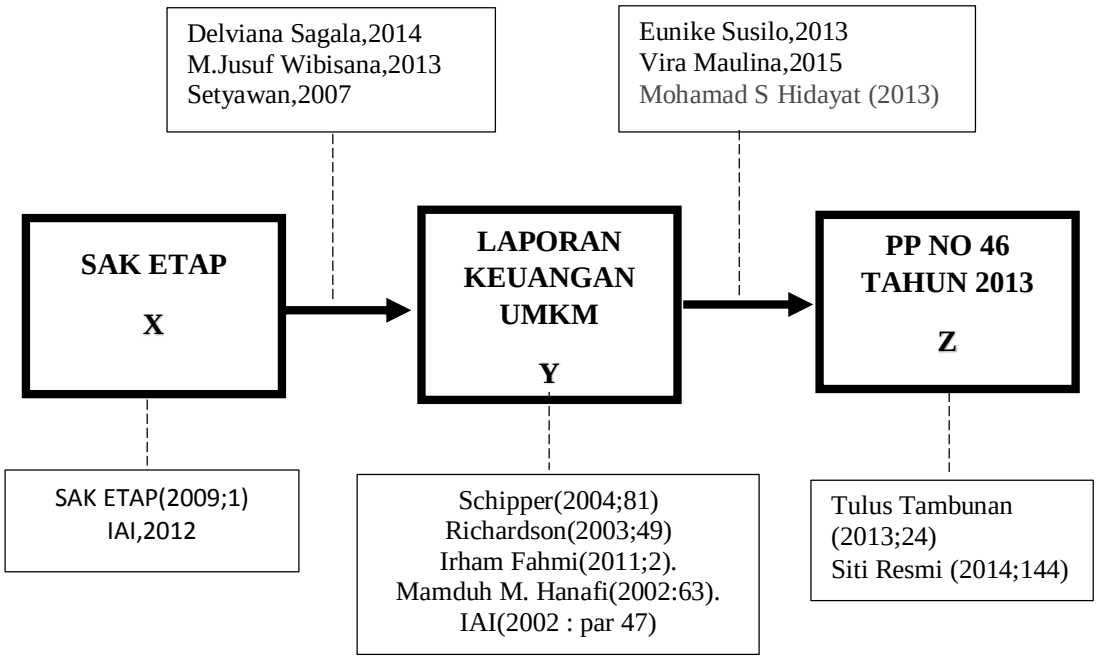
Berlakunya PP nomor 46 tahun 2013 yang menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan objek pajak, maka setiap usaha kecil diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa usaha yang memiliki omzet atau peredaran bruto kurang dari 4,8 Milyar rupiah dalam satu tahun wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya (Vira Maulina/2015)

Bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan upaya yang perlu dilakukan pemerintah agar wajib pajak paham dan mau membayar pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Eunike Jacklyn Susilo /2013).

Lemahnya pengetahuan perpajakan terkait dengan transaksi bisnis UMKM menyebabkan UMKM tersebut tidak melaksanakan kewajibannya kepada Negara. penyusunan laporan keuangan sangat dibutuhkan sebuah aplikasi pembukuan yang sederhana dan terintegrasi dengan pajak berbasis standar akuntansi yang berlaku saat ini. Pentingnya akuntansi harus dipahami oleh pengusaha UMKM secara praktis tanpa harus mempelajari ilmu akuntansi. Hal ini disebabkan karena dengan adanya laporan keuangan sebagai salah satu bentuk penyampaian informasi akuntansi, para pemilik usaha dapat mengetahui bagaimana posisi serta kinerja keuangannya. Tidak hanya itu, pemilik usaha akan lebih mudah untuk menghitung pajak, karena laporan keuangan merupakan sumber data untuk menghitung pajak(Vira Maulina/2015).



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2011:64) menjelaskan bahwa:
"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas maka penulis menarik hipotesis penelitian ini, yaitu bahwa:

H1= Penerapan SAK ETAP berpengaruh terhadap kualitas lapotan keuangan UMKM.

H2= Kualitas laporan keuangan UMKM berpengaruh terhadap penerapan peraturan pemerintah tahun 2013.